

VI

Penyelesaian Kasus Lamno

HPH PT AAP Beri Bantuan Rp 750 Juta

Serambi-Meulaboh

Penyelesaian sejumlah masalah yang memicu gejolak massa di Kecamatan Jaya, Aceh Barat pada awal Idul Fitri lalu mulai mengarah, di antara tercapai kesepakatan HPH PT AAP akan memberikan bantuan Rp 750 juta untuk masyarakat Lamno.

Dari 17 tuntutan yang disampaikan masyarakat, hanya tersisa sebagian kecil yang masih dalam proses penyelesaian atau memerlukan penajakan lebih lanjut.

Dalam tuntutan tertanggal 20 Januari 1999, secara tegas masyarakat Kecamatan Jaya yang dimotori kalangan mahasiswa menyatakan tidak ada dialog di tingkat muspika, kecuali dengan Pemda Daerah Istimewa Aceh dan Tingkat II Aceh Barat.

Karenanya, Pemda Aceh Bar-

at menggelar musyawarah yang diikuti tokoh-tokoh masyarakat Jaya, manajemen HPH PT Alas Aceh Perkasa (AAP), dan Muspida Aceh Barat sendiri di Meuligou Hotel Meulaboh, Senin lalu. "Melalui dialog ini hendaknya bisa menyelesaikan masalah," kata Kabag Humas Pemda Aceh Barat, Drs Salamuddin.

Khusus menyangkut penyelesaian masalah dengan PT AAP, Pemda Aceh Barat berperan sebagai mediator antara masyarakat dengan manajemen perusahaan tersebut. Dalam dialog yang berlangsung di Meuligou Hotel, pihak AAP diwakili Samsul Armen.

Ketika dialog sudah menyentuh tuntutan mendasar masyarakat Jaya yaitu kewajiban perusahaan HPH PT AAP mengalokasikan dana untuk pembinaan lingkungan masyarakat sekitarnya sebesar Rp 5 milyar, terjadi "tawar-menawar" sehingga dialog agak alot.

Semula masyarakat bertahan dengan "angka mati" Rp 1 milyar yang harus lunas selama enam

tahun. Rinciannya, untuk dua tahun pertama sebesar Rp 50 persen, dua tahun kedua 25 persen, dan dua tahun ketiga 25 persen.

Selain anggaran Rp 1 milyar, perusahaan itu juga diwajibkan membangun masjid di sekitar HPH, pembangunan jalan Desa Putu, dan pembangunan asrama mahasiswa asal Kecamatan Jaya di Banda Aceh.

Manajemen PT AAP menilai angka Rp 1 milyar itu tidak sanggup mengingat kondisi perusahaan yang belum mantap. Akhirnya dialog yang dipimpin Bupati Aceh Barat Drs Nasruddin MSI menyepakati angka realistik Rp 750 juta plus kewajiban perusahaan merealisasikan ketiga tuntutan lainnya.

Bantuan Rp 750 juta itu merupakan angka minimal. Artinya, kalau perusahaan merugi, angka itu tetap. Tapi sebaliknya jika perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, wajib ditambah. Sedangkan tenggang waktu cicilan anggaran tetap enam tahun (selama tiga termen), den-

gan rincian 50 persen, 25 persen, dan 25 persen. "Kami mengharapkan agar ada transparansi audit," kata salah seorang peserta dialog dari kalangan mahasiswa.

Sebagaimana pernah diberitakan, pada 19 Januari 1999 terjadi gejolak massa di Kecamatan Jaya yang berbuntut pada rusaknya sejumlah bangunan di pusat pasar, dan penyerbuan base camp Kuala Unga PT Alas Aceh Perkasa. Khusus untuk PT AAP diajukan tujuh butir tuntutan, salah satunya adalah pengalokasian anggaran Rp 5 milyar.

Sedangkan tuntutan lainnya (total tuntutan 17 butir) — sebagaimana dibacakan satu per satu oleh mahasiswa pada dialog di Meuligou Hotel — sebagian besar di antaranya sudah diselesaikan. "Terhadap permasalahan yang belum selesai atau masih dalam proses penyelesaian, akan secepatnya dicarikan solusi terbaik guna menghindari terjadinya keresahan masyarakat," kata Kabag Humas Pemda Aceh Barat. (asi/za)